

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah merupakan suatu Lembaga publik yang bertujuan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan dewan perwakilan rakyat daerah dengan diikuti asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip yang berada di otonomi daerah dan prinsip negara kesatuan yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah juga di atur dalam peraturan perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih megoptimalkan kerja dari suatu pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah dari suatu pemerintah daerah yang bertujuan sebagai pusat pertanggung jawaban atas jalannya suatu pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Lucki dan Entot, 2019). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipimpin oleh kepala satuan kerja. Contoh dari SKPD antara lain, SKPD dinas pendidikan, SKPD dinas Kesehatan, SKPD dinas budaya dan olahraga, dan sebagainya. Dengan adanya pertanggung jawaban yang baik oleh pemerintah daerah maupun SKPD akan menimbulkan tata Kelola yang baik dalam pemerintah tersebut (*Good Governance*).

Tata Kelola yang baik dalam suatu pemerintahan daerah merupakan sebuah isu yang sangat hangat. Tata Kelola yang masih menggunakan cara-cara lama untuk

menjalankan pemerintah yang menjadikan pemerintah pada suatu negara merasa dominan dan mengecilkan masyarakat dalam implementasinya merupakan suatu kegagalan dalam tata Kelola pemerintahan yang baik (Yaqin & Jatmiko, 2018). Tata Kelola yang baik bisa dimulai dengan meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat, salah satunya yaitu transparansi informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Transparansi pada laporan keuangan bisa didukung dengan faktor-faktor pendukung, yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intenal, dan Sistem Informasi Akuntansi.

Dalam Al-Quran juga telah menyampaikan bahwa kita sebagai manusia wajib untuk menyampaikan amanah kepada orang yang sudah di titipkan, termuat dalam surat *An-Nisa* ayat 58 :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa’ : 58)

Dalam penjelasan Qur’an di atas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat islam untuk selalu menjaga amanah yang sudah diberikan kepada kita dan harus menyampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Informasi-informasi yang disampaikan oleh suatu pemerintah daerah harus jujur dan transparan kepada masyarakatnya sesuai dengan aktifitas-aktifitas yang dijalankan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu.

Aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah daerah maupun oleh SKPD dinilai dengan informasi-informasi yang bisa di akses selama tahun berjalan suatu periode pemerintahan tersebut. Salah satu faktor informasi tersebut yaitu informasi keuangan. Informasi keuangan bisa di akses dengan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan dalam suatu pemerintahan tidak hanya diperuntukan untuk pemerintah pusat saja, tetapi berlaku untuk pemerintahan daerah, seperti pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). UU No. 17 tahun 2003 pasal 31 ayat (1) menjelaskan tentang Keuangan Negara, yang berisi bahwa laporan keuangan penting untuk pemerintah pusat maupun daerah sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan APBD yang akan dilaporkan kepada DPRD yaitu laporan keuangan yang telah di periksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari suatu pelaksanaan kinerja pada suatu pemerintahan yang berhubungan dengan keuangan yang diukur dengan periode yang telah ditentukan untuk dapat di nikmati oleh para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan yang berkualitas agar dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan opini bagi pengguna laporan keuangan. Karena Standar Akutansi Pemerintahan pun menetapkan bahwa laporan keuangan berisi informasi keuangan yang bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan pada pemerintah daerah memiliki perbedaan struktur pada laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan.

Laporan keuangan juga pada pelaksanaannya telah diberikan wewenang dalam penyelenggaraan pengelolaan laporan keuangan dengan memakai prinsip

efektif, efisien, akurat, berjalan lurus dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan. Menurut Putri dkk (2017) mengatakan bahwa informasi keuangan yang baik terdapat empat (4) karakteristik, antara lain dapat dipahami, relevan, reliabel, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Juga mempunyai kemampuan untuk menyajikan informasi yang dapat dirasakan manfaatnya bagi pengguna laporan keuangan. Sesuai dengan penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), anantara lain :

1. Menyediakan informasi berupa kecukupan dalam penerimaan periode yang sedang berjalan guna membiayai seluruh pengeluaran yang dijalani.
2. Menyediakan informasi berupa cara-cara mendapatkan sumber daya ekonomi yang sesuai dan alokasi yang tepat terhadap anggaran yang sudah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyediakan informasi berupa seberapa banyak sumber daya ekonomi yang telah digunakan untuk kegiatan-kegiatan dan hasil yang diperoleh.
4. Menyediakan informasi berupa dana yang dipakai untuk kegiatan dan memperoleh kasnya sebagai entitas pelaporan.
5. Menyediakan informasi berupa posisi keuangan yang diperoleh dari sumber penerimaan jangka pendek ataupun jangka panjang termasuk juga pajak dan pinjaman yang di peroleh.
6. Menyediakan informasai berupa melihat apakah terjadi perubahan posisi keuangan yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan pada saat periode yang telah ditentukan.

Dengan begitu laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, secara tidak langsung menerapkan standar-standar yang telah ditentukan oleh Standar Akutansi Pemerintahan. Apabila Pemerintah Daerah melakukan Langkah-langkah dengan baik, maka hasil laporan keuangan akan mendapatkan opini yang baik oleh BPK (Badan pemeriksa Keuangan) sebagai audit.

Laporan keuangan pemerintah daerah akan diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keungan) sebagai audit dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan apabila sudah teraudit oleh BPK. Dalam pelaksanaannya terdapat empat (4) opini yang dapat diberikan oleh BPK, antara lain : (1) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dapat diartikan laporan keuangan tersebut baik atau wajar yang sudah sesuai dengan standar SAP yang telah ditentukan dan tidak ada pengecualian, (2) WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang dapat diartikan bahwa laporan keuangan tersebut masih dapat dikatakan sesuai dengan standar SAP, tetapi memiliki pengecualian-pengecualian, (3) TW (Tidak Wajar) yang dapat diartikan bahwa laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan standar SAP yang berlaku, (4) TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) yang dapat diartikan bahwa laporan keuangan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan auditor merasa tidak yakin terhadap laporan keuangan tersebut (Frasca dan Widhy, 2019).

Dengan adanya kualitas Sumber Daya Manusia yang mempuni dapat mendukung kinerja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan periode berjalannya. Kualitas sumber daya manusia juga dapat memberikan penilaian terhadap kualitas laporan keuangan tersebut. Apabila memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik maka akan menghasilkan

kualitas laporan keuangan yang baik juga dan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat diterima oleh para pembaca laporan keuangan tersebut. Dengan era teknologi dan informasi yang ada pada saat ini, dapat meningkatkan keahlian dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tidak hanya sumber daya manusia saja, sistem pengendalian internal dapat menjadi faktor lain yang mendukung baiknya informasi keuangan yaitu laporan keuangan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kemampuan dalam penggunaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dapat menjadikan nilai plus yang dapat membantu kinerja dari Pemerintah Daerah itu sendiri (Yaqin & Jatmiko, 2018). Karena Sistem Pengendalian Internal mungkin juga dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal juga dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan sebuah sistem yang mengacu pada proses integral yang diperuntukan kepada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin dan pegawai untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien (Ni Luh dan Ni Nyoman, 2020). Sistem pengendalian yang berada di pemerintahan disebut dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Tidak ada perbedaan antara SPI dan SPIP hanya membedakan focus yang dilakukan. Dengan lemahnya sistem pengendalian internal pada suatu pemerintah daerah akan menimbulkan penyimpangan dan kebocoran pada informasi keuangan yaitu laporan keuangan, yang mengakibatkan laporan keuangan tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan oleh Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Faktor lain yang juga dapat memengaruhi laporan keuangan yaitu Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sebuah sistem yang ditetapkan untuk mempermudah pegawai bagian keuangan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi keuangan yang didapatkan (Frasca dan Widhy, 2019). Sistem informasi akuntansi juga dapat mempermudah para pembaca laporan keuangan untuk melihat laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan SAP yang ditetapkan. Dengan begitu sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan informasi keuangan yang akan dilaporkan. Dengan begitu Sistem Informasi Akuntansi dapat mendukung aktifitas yang dijalankan oleh pemerintah daerah maupun SKPD.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan audit setiap tahun kepada pemerintah daerah terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di seluruh provinsi di Indonesia. Mencatatkan pada pemeriksaan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 bahwa BPK telah memeriksa 541 dari 542 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2019 hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%), opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 6 (1%). Jumlah opini WTP mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 82% (www.bpk.or.id).

Dari pemeriksaan BPK terdapat beberapa pemerintahan daerah yang mengalami penurunan opini dari WTP ke WDP, yaitu Pemkot Subulussaman, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Konawe Selatan. Penurunan-penurunan ini

terjadi kurang konsistennya pemerintah daerah dalam menuliskan dan memuat informasi-informasi keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap Provinsi Banten. Pada implementasinya Pemerintah Provinsi Banten dari tahun 2015 – 2019 opini yang disajikan oleh BPK RI terlihat dari hasil pemeriksaan LKPD dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 1. 1 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Provinsi Banten Tahun 2015-2019

Tahun	Opini BPK RI
2015	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber : banten.bpk.go.id

Dilihat dari tabel 1.1 merupakan hasil dari sebuah audit yang telah dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pemerintahan provinsi banten mencatatkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, rata-rata mendapatkan hasil opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) hanya saja tahun 2015 pemerintah Provinsi Banten mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Dengan data di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah menjalankan

Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dengan benar sehingga dapat mendapatkan hasil yang baik juga.

Apabila Pemerintah Provinsi Banten dapat mencatatkan hasil opini yang baik, harusnya didukung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan hasil opini yang baik juga. Adapun hasil penelitian opini yang dihasilkan oleh audit BPK terhadap Pemerintah Kota Cilegon dari tahun 2015-2019.

Tabel 1. 2 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Kota Cilegon Tahun 2015-2019

Tahun	Opini BPK RI
2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber : banten.bpk.go.id

Dilihat dari tabel 1.2 merupakan hasil dari sebuah audit yang telah dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mencatatkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon mencatatkan hasil yang baik dalam kurun 5 tahun kebelakang, Pemerintah Kota Cilegon mencatatkan hasil sempurna yaitu dengan meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berturut-turut dalam kurun 5 tahun terakhir (banten.bpk.go.id). Dengan begitu dapat menggambarkan bahwa kinerja pegawai

keuangan dan informasi keuangan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP).

Pemerintah Kota Cilegon dengan meraih hasil opini baik dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) membuktikan bahwa pemerintah kota cilegon baik dalam memerhatikan aspek-aspek untuk menyusun informasi keuangan yaitu laporan keuangan. Pemerintah Kota Cilegon dituntut untuk dapat mempertahankan opini tersebut untuk tahun-tahun yang mendatang. Perolehan WTP secara berurutan-turut oleh pemerintah Kota Cilegon bisa dijadikan motivasi bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia untuk dapat menciptakan atau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam penelitian terdahulu oleh Frasca dan Widhy (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasional, sistem informasi akutansi, dan audit internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lucki dan Entot (2019) menyatakan bahwa sistem informasi keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Addinul dan Bambang (2018) juga menyatakan bahwa kontribusi sumber daya manusia, standar akutansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kab. Biak Numfor. Penelitian oleh Irzal dan Suparno (2017) menyatakan bahwa sistem informasi akutansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Bandar Aceh.

Terdapat perbedaan beberapa faktor dan objek yang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mengakibatkan ketidakkonsistenan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Maka dari itu, penelitian ini merupakan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Irzal Tawaqal dan Suparno yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Banda Aceh” Adapun perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada tahun penelitian dan objek pada penelitian, dimana objek penelitian sebelumnya pada SKPD Kota Banda Aceh, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya pada SKPD Kota Cilegon. Sedangkan untuk perbedaan tahun penelitian karena penelitian yang dilakukan oleh Irzal dan Suparno merupakan penelitian pada tahun 2017, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini adalah penelitian yang dilakukan tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dan penelitian terdahulu Irzal dan Suparno (2017) penulis tertarik untuk melakukan penelitian replikasi mengenai kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi karena penelitian yang dilakukan oleh Irzal dan Suparno penelitian yang sudah lama, karena dilakukan pada tahun 2017, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali apakah variabel-variabel tersebut masih dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Informasi Akuntansi adalah variabel yang saling berhubungan karena laporan keuangan dapat memperoleh hasil yang baik hanya memperhatikan input, proses, dan output yang baik juga. Berdasarkan tujuan

tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Informasi Akutansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah”**

Motivasi penelitian ini adalah karena masih terdapat kota-kota yang hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, masih terdapat juga Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih belum meningkatkan konsistensi pemerintahannya untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Motivasi berikutnya yaitu adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga menjadikan penulis tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?
3. Apakah Sistem Informasi Akutansi Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan arahan yang menjadi pedoman pada penelitian untuk menemukan hasil atas permasalahan penelitian yang dirumuskan. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Sistem Pengendalian Internal
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Sistem Informasi Akuntansi

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dituju, penelitian ini dimaksudkan untuk mempunyai manfaat untuk Pendidikan kedepannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat antara lain :

- 1) Memberikan pengetahuan dibidang keuangan tentang cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan
- 2) Memberikan sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengacu pada kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akutansi

- 3) Sebagai referensi ataupun pemikiran bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut penelitian pada kualitas laporan keuangan di SKPD pemerintahan daerah

2. Manfaat prkatis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat antara lain :

1) Bagi penulis

Menambah informasi dan pembelajaran terkait dengan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada di SKPD pemerintah daerah.

2) Bagi SKPD Kota Cilegon:

Menjadi referensi untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan dan yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Cilegon.

3) Bagi pemakai laporan keuangan

Bagi pemakai laporan keuangan, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk menilai SKPD mana yang ada di Kota Cilegon yang konsisten dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang di laporkan.